

Empowerment of Sosial Welfare Problem Sufferes (PMKS) Psychotic Homeless People at UPTD Liponsos Keputih Surabaya [Pemberdayaan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Gelandangan Psikotik Di UPTD Liponsos Keputih Surabaya]

Adela Anggani¹⁾, Isnaini Rodiyah ^{*2)}

¹⁾Program Studi Administrasi Publik, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia

²⁾ Program Studi Administrasi Publik, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia

*Email Penulis Korespondensi: isnainirodiyah@umsida.ac.id

Abstract. *The population of psychotic homeless individuals in Surabaya has become a key concern for the local government. UPTD Liponsos Keputih plays a central role by providing social welfare services, including mental, spiritual, physical, social, and skill development support. This study employs a qualitative descriptive method to explore empowerment efforts for PMKS at the institution. It focuses on three indicators: awareness-building, capacity development, and empowerment. Using purposive sampling, key informants include the head of UPTD, client companions, and skill trainers. Data were collected through field observations, interviews, and documentation. Analysis followed Miles and Huberman's model: data collection, reduction, presentation, and conclusion. Findings show that current empowerment efforts remain less effective, especially in the capacity-building stage due to limited trainer capabilities. Thus, a more flexible training mechanism such as video-based modules is recommended as an alternative system.*

Keywords – PMKS Empowerment; Psychotic Bum; Sosial Cottage Environment(Liponsos)

Abstrak. *Populasi gelandangan psikotik di Kota Surabaya menjadi sorotan utama bagi pemerintah. UPTD Liponsos Keputih mempunyai peran utama dalam hal tersebut yakni, membidangi pelayanan kessjahteraan sosial seperti pemberian pengawasan mental, spiritual, jasmani, sosial dan keterampilan. Metode deskriptif kualitatif dipilih dengan tujuan dapat mendeskripsikan pemberdayaan PMKS di UPTD Liponsos Keputih. Fokus penelitian ini pada 3 indikator:Penyadaran, Pengkapasitasan, dan Pendayaan. Teknik purposive sampling digunakan, dengan informan dalam penelitian ini yakni: Kepala UPTD, Pendamping klien(pmks), dan pembimbing keterampilan. Pengumpulan data diambil dari observasi lapangan, wawancara serta dokumentasi. Analisis data menggunakan teknik Miles&Hubermn yang meliputi: pengumpulan data, reduksi data, penyajian dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian mengindikasikan pemberdayaan yang dilakukan sejauh ini belum cukup efektif, hal ini terlihat pada tahap pengkapasitasan bahwa masih adanya keterbatasan pembimbing dalam pelaksanaannya. Maka dari itu, perlunya mekanisme pelatihan yang lebih fleksibel dengan menggunakan pelatihan berbasis video sebagai sistem alternatif dalam pelatihan.*

Kata Kunci – Pemberdayaan PMKS, Gelandangan Psikotik, Lingkungan Pondok Sosial Keputih(Liponsos)

I. PENDAHULUAN

Terletak di pulau Jawa, Surabaya merupakan wilayah paling besar ke-2 di Indonesia. Badan Pusat Statistik (BPS) memproyeksikan Kota Surabaya dihuni oleh 3.009.286 jiwa pada tahun 2023 [1] . Pertambahan penduduk yang pesat tanpa pemerataan pembangunan dan masuknya imigran dari kota-kota besar menjadi penyebab utama padatnya penduduk. Dampaknya, masyarakat sekitar kurang mendapat perhatian dan pelayanan yang layak, hingga berujung pada timbulnya berbagai kesulitan sosial.

Berbagai masalah sosial yang terjadi di Surabaya menimbulkan tantangan besar dan dapat memberikan dampak negatif terhadap masyarakat luas. Salah satu permasalahan sosial yang paling memprihatinkan adalah meningkatnya jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). PMKS merupakan individu atau kelompok dengan disfungsi sosial yang menghadapi hambatan dalam menjalin interaksi sosial yang sehat secara jasmani, rohani, dan sosial di lingkungannya. Bentuk dari PMKS sangat beragam, antara lain pengemis, tunawisma dengan gangguan kejiwaan, orang lanjut usia yang terlantar, anak jalanan, dan lain sebagainya. Salah satu kelompok PMKS yang menjadi perhatian khusus adalah gelandangan psikotik. Gelandangan psikotik didefinisikan sebagai individu yang mengalami gangguan jiwa, hidup terlantar di jalanan, dan seringkali menunjukkan perilaku tidak biasa serta kualitas hidup yang sangat rendah. Gelandangan dengan psikosis biasanya berkeliaran tanpa tujuan, berpakaian tidak layak, dan menyebabkan gangguan pada lingkungan sekitar yang menimbulkan kekhawatiran di tengah masyarakat.[2]

Hal tersebut juga dapat dilihat dari data Badan Pusat Statistik Jawa Timur terakhir pada tahun 2019, bahwa Kota Surabaya menduduki peringkat pertama dengan jumlah gelandangan psikotik sebanyak 1.911 orang, jumlah terbanyak dibandingkan kota mana pun. [3]Peningkatan jumlah gelandangan psikotik menjadi tanggungjawab pemerintah jika tidak segera diatasi, akan berdampak buruk di wilayah metropolitan Surabaya. Selain itu juga, hal ini dapat dilihat berdasarkan data jumlah PMKS dari UPTD Liponsos Keputih Surabaya sebagai berikut,

Tabel 1. Jumlah PMKS Berdasarkan Jenisnya Tahun 2024

Jenis PMKS	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
Gelandangan	27	10	37
Gelandangan Psikotik	117	37	154
Pengemis	1	1	2
Pengamen	12	0	12
Lansia Terlantar	25	19	44
Anak Terlantar	4	0	4
Orang Terlantar	10	1	11
Anak Jalanan	1	1	2
PRSE	0	1	1
Jumlah			267

Sumber : UPTD Liponsos Keputih

Menurut data Tabel 1 pada tahun 2024 populasi gelandangan psikotik di Kota Surabaya menunjukkan jumlah PMKS terbanyak, yaitu mencapai 154 orang dari total 267 PMKS. Jumlah ini menunjukkan bahwa pendekatan dengan kelompok ini akan memberikan dampak besar terhadap penanganan masalah kesejahteraan sosial secara umum. Selain itu, individu dengan penyakit ini termasuk kelompok yang paling mungkin diabaikan karena berbagai alasan, termasuk kemiskinan, ketidakmampuan keluarga untuk menafkahi mereka, atau ketidaktahuan akan penyakit tersebut, yang dapat membuat mereka kehilangan tempat tinggal atau ditinggalkan di jalanan dan menyebabkan gangguan pada lingkungan sekitar. Dimana setiap warga negara berhak atas kesejahteraan sosial, yang merupakan sasaran utama dalam proses pembangunan. Pencapaiannya melibatkan peran aktif negara bersama masyarakat, dan kesejahteraan sosial itu sendiri menjadi tolok ukur penting dalam menilai keberhasilan pembangunan nasional.[4]

Namun demikian, jika dengan pendekatan yang tepat gelandangan dengan psikosis dipandang memiliki potensi untuk dipulihkan dan diberdayakan apabila mendapatkan dukungan sumber daya yang memadai mencakup layanan sosial yang terintegrasi, perawatan medis secara berkelanjutan, serta bimbingan dan pendampingan sosial yang konsisten. Dengan penanganan yang sistematis dan pendekatan psikososial mereka dapat berkontribusi kembali dalam masyarakat. Hal ini tidak hanya akan mengurangi beban sosial dan ekonomi yang ditanggung oleh pemerintah, tetapi juga meningkatkan kualitas hidup individu yang bersangkutan.

Di samping itu, sebagian besar gelandangan psikotik berada dalam usia produktifnya, yang secara teoritis masih memiliki kapasitas untuk belajar, beradaptasi, serta bekerja. Dengan kata lain, mereka masih memiliki potensi dasar untuk menjalani pelatihan keterampilan dan mengikuti program pemberdayaan apabila mendapatkan program pendampingan yang tepat. Berdasarkan Undang-Undang No 11 Tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial, menyatakan bahwa kesejahteraan sosial menjadi tanggung jawab pemerintah pusat maupun daerah, maka dari itu Pemerintah Kota Surabaya mendirikan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Lingkungan Pondok Sosial Keputih yang bekerjasama dengan Dinas Sosial Surabaya guna mampu mengatasi permasalahan kesejahteraan sosial, khususnya dalam menangani gelandangan psikotik. [5]

Pembuatan serta tata urutan organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas Lingkungan Hidup Pondok Sosial Keputih diatur dalam Peraturan Wali Kota Surabaya No 118 Tahun 2021, khususnya pada pasal 5 yang menjelaskan fungsi unit ini dalam memberikan pelayanan sosial tertentu. Fokus pelayanan meliputi rehabilitasi sosial bagi tunawisma, termasuk tunawisma dengan gangguan psikotik, dan anak jalanan.[6]

Peran UPTD Liponsos Keputih sebagai lembaga yang membidangi pelayanan kesejahteraan sosial, yakni bekerja sama dengan Satpol PP Kota Surabaya untuk mendukung penanganan individu terlantar dengan kesulitan kesejahteraan sosial, salah satunya yakni gelandangan psikotik. Hasil dari temuan atau penertiban Satpol PP Kota Surabaya nantinya disalurkan ke UPTD Liponsos Keputih yang menjadi tempat pengungsian sementara bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial. Selain sebagai tempat pengungsian, UPTD Liponsos Keputih juga berfungsi sebagai pusat rehabilitasi dan pemberdayaan sosial PMKS.[7]

Selain menyediakan tempat tinggal sementara, UPTD Liponsos Keputih juga menjalankan peran penting sebagai pusat rehabilitasi dan pemberdayaan sosial bagi PMKS. Hal tersebut tertuang dalam pembentukan dan susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Lingkungan Pondok Sosial Keputih yang diatur dalam pasal 6 huruf

(f) dalam perwali Surabaya No. 118 Tahun 2021 yang menyebutkan, UPTD Liponsos Keputih bertugas memberikan latihan keterampilan, bimbingan mental, spiritual, jasmani, dan sosial.[8].

Program pemberdayaan PMKS yang dijalankan pihak UPTD Liponsos Keputih Surabaya mencakup berbagai kegiatan dengan tujuan guna memberikan aktivitas pada klien di waktu senggang sebagai kegiatan terapeutik, serta meningkatkan kapasitas dan tingkat kemandirian. Melalui pendekatan yang komprehensif ini, UPTD Liponsos Keputih tidak hanya berupaya menyembuhkan dan menstabilkan kondisi psikis gelandangan psikotik, tetapi juga mempersiapkan mereka untuk kembali ke tengah masyarakat dengan kemampuan dan kemandirian yang lebih baik. Upaya ini juga diharapkan dapat menciptakan dampak jangka panjang dalam menekan jumlah PMKS dan meningkatkan kesejahteraan sosial secara menyeluruh di Kota Surabaya. Program-program pemberdayaan itu yakni seperti, jalan kaki pagi atau sore hari merupakan salah satu bentuk latihan fisik rutin yang wajib diikuti dan dilakukan setiap harinya. Bimbingan spiritual dan mental, termasuk bimbingan sholat dan mengaji guna memperkuat aspek psikologis dan keimanan para klien. Selain itu, mereka juga dilibatkan dalam pelatihan keterampilan seperti menjahit, membuat batik, kerajinan tangan, budidaya tanaman, dan mendirikan cuci motor/mobil.

Tabel 2. Jenis Kegiatan Pemberdayaan di UPTD Liponsos Keputih Tahun 2024

Jenis Kegiatan	Pelaksanaan	Peminat
Menjahit	Fleksibel	2 Orang
Membatik	Setiap Hari Kamis	10 Orang
Handicraft	Setiap Hari Kamis	12 Orang
Budidaya Tanaman	Fleksibel	6 Orang
Cuci Mobil/Motor	Fleksibel	10 Orang
Jumlah Peminat		40 Orang

Sumber: UPTD Liponsos Keputih Surabaya

Pada Tabel 2 menandakan bahwa kegiatan handicraft merupakan kegiatan pemberdayaan yang paling banyak diminati oleh PMKS di UPTD Liponsos Keputih dengan jumlah 12 orang. Meskipun berbagai jenis kegiatan telah disediakan, jumlah total PMKS yang mengikuti kegiatan pemberdayaan ini hanya mencapai 40 orang. Jika dibandingkan dengan data yang ada pada Tabel 1 yang menunjukkan bahwa terdapat 154 gelandangan psikotik, maka angka tersebut menunjukkan bahwa hanya sebagian kecil kurang dari sepertiga yang berpartisipasi dalam kegiatan pemberdayaan. Hal ini menunjukkan masih rendahnya keterlibatan PMKS dalam program-program yang disediakan.

Di sisi lain, individu atau kelompok PMKS, khususnya gelandangan psikotik yang mengikuti kegiatan pemberdayaan di UPTD Liponsos Keputih, menunjukkan kemampuan untuk mengikuti kegiatan sesuai arahan dari pendamping maupun pembina. Meskipun beberapa di antara mereka masih memiliki keterbatasan dalam memahami secara menyeluruh apa yang sedang dilakukan, tetapi mereka tetap dapat terlibat dalam aktivitas dengan perilaku yang relatif normal dan terarah. Bahkan, selama kegiatan berlangsung para peserta tidak dilepaskan begitu saja, melainkan selalu berada dalam pengawasan pendamping yang memastikan jalannya aktivitas dengan aman dan tertib. Hal ini menunjukkan bahwa, apabila dengan pendekatan yang tepat serta pengawasan yang konsisten, individu dengan gangguan psikotik pun masih memiliki kemampuan untuk berpartisipasi aktif dalam proses pemberdayaan.

Konsep pemberdayaan ialah sebuah proses dan tujuan. Berdasarkan sebuah proses, pemberdayaan adalah rangkaian aktivitas yang dimaksudkan untuk meningkatkan otoritas atau penentuan nasib sendiri individu atau kelompok yang terpinggirkan. Di sisi lain, pemberdayaan merupakan tujuan yang hendak dicapai melalui perubahan sosial, yakni mewujudkan individu yang berpotensi, mampu memenuhi kebutuhan jasmani, ekonomi, dan sosialnya, memiliki rasa percaya diri, memperoleh penghidupan yang layak, serta berpartisipasi dalam aktivitas sosial.[9]

Wrihatnolo dan Dwidjowijoto (2007) mendefinisikan pemberdayaan sebagai upaya untuk mengangkat status mereka yang tidak mampu melepaskan diri dari marginalisasi sosial; Dengan kata lain, pemberdayaan adalah kemampuan untuk menciptakan kemandirian sosial. Sebagai bentuk upaya berkelanjutan, maka dalam proses pemberdayaan harus ada langkah-langkah yang dilakukan dengan harapan tercapainya proses tersebut. Proses pemberdayaan ini terdiri dari tiga tahapan utama yakni: penyadaran, pengkapasitasan, dan pendayaan.[10]

Langkah pertama proses pemberdayaan disebut Tahap Penyadaran. Pada fase ini, target akan memperoleh kesadaran akan hak-hak dan keterampilan mereka serta mulai percaya dan menyadari bahwa mereka mempunyai hak-hak tersebut, dengan penyadaran tersebut, individu maupun kelompok terpinggir mulai mengerti potensi dan hak mereka, serta mengubah sikap pasif menjadi kesadaran tentang kekuatan sendiri. Langkah kedua setelah sasaran diberi kesadaran akan hak-hak nya, sasaran menerima penyuluhan dan program atau pelatihan untuk memperoleh pengetahuan atau kemampuan (terampil) sehingga mereka dapat menerima kuasa, dengan bekal keterampilan dan pengetahuan baru ini, masyarakat lebih siap dalam mengelola sumber daya serta mengambil inisiatif dalam pembangunan. Tahap pendayaan merupakan tahap terakhir dari pemberdayaan, dimana sasaran diberikan kewenangan, bahkan kesempatan berdasarkan kualitas bakat atau kemampuannya, selain itu pada tahapan ini juga

memastikan masyarakat memiliki ruang nyata untuk berpartisipasi aktif dan mengendalikan proses pembangunan di lingkungannya.[11]

Tahapan-tahapan pemberdayaan tersebut telah dilakukan UPTD Liponsos Keputih dalam rangka untuk mengoptimalkan potensi yang dimiliki oleh Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). Kegiatan pemberdayaan seperti handicraft menjadi pelatihan pemberdayaan banyak diminati, hal ini disebabkan oleh menariknya suatu produk keterampilan dan produksi produk yang cukup mudah. Namun demikian, dalam pelaksanaannya masih menghadapi kendala seperti, terbatasnya bimbingan yang diberikan serta kurang efektifnya implementasi program, sehingga berpotensi menghambat perkembangan PMKS.

Adapun penelitian terdahulu yang membahas tentang pemberdayaan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), yaitu penelitian pertama oleh Laurensya, Djoko, Adi (2022) dengan menerapkan metode penelitian kualitatif deskriptif menunjukkan bahwa hasil pemberdayaan yang dilakukan dengan menggunakan teori menurut Suharto dengan 5 indikator dinyatakan belum berjalan dengan maksimal serta masih terdapat beberapa faktor seperti kurangnya pengawasan saat pelatihan maupun minimnya pemenuhan dari segi papan bagi klien (PMKS). [12]

Penelitian Kedua dilakukan oleh, Syahzaki Alrahman (2022) dengan menggunakan teori pemberdayaan menurut Parsons et al dengan 3 indikator yakni; aras mikro, mezzo, dan makro. Dengan hasil penelitian tersebut menunjukkan jika pelaksanaan pemberdayaan sudah berjalan, namun masih belum optimal dikarenakan kurangnya sosialisasi serta adanya faktor dari pandemi covid-19 yang menyebabkan peningkatan pada angka kemiskinan.[13]

Penelitian Ketiga dilakukan oleh, Adhitya Wardhana (2023) dengan hasil penelitian bahwa masih diperlukannya peningkatan kompetensi dan pengetahuan, serta partisipasi aktif dalam masyarakat. Selain itu, *monitoring* juga evaluasi kinerja dalam organisasi diperlukan dan jadi aspek penting dalam mencapai tujuan dari pemberdayaan.[14]

Berdasarkan gambaran permasalahan yang telah dijabarkan diatas dan didukung dengan penelitian terdahulu, bahwa pemberdayaan di UPTD Liponsos masih memiliki kekurangan seperti hal-nya minimnya bimbingan yang diberikan, serta masih kurang efektifnya pelaksanaan. Hal tersebut menunjukkan bahwa Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) masih memerlukan pendampingan kegiatan lain guna mengembangkan potensi diri agar kembali berdaya. Maka dari itu peneliti memiliki ketertarikan untuk meneliti terkait Pemberdayaan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) gelandangan psikotik di UPTD Lingkungan pondok sosial Keputih Surabaya melalui Teori Pemberdayaan menurut Wrihatnolo & Dwidjowijoto (2007) dengan 3 indikator yakni Tahap Penyadaran, Pengkapasitasan serta Pendayaan.

II. METODE

Jenis penelitian yang diterapkan dalam penelitian ini yakni deskriptif kualitatif dengan tujuan mencari informasi mengenai suatu permasalahan yang menjadi fokus penelitian. Dimana penelitian dengan metode ini diharapkan dapat mendeskripsikan dan menggambarkan keadaan subyek maupun obyek secara sistematis, faktual berdasarkan fakta dan fenomena di lapangan, sehingga dapat memberikan gambaran terkait pemberdayaan penyandang masalah kesejahteraan sosial tentang gelandangan psikotik yang diadakan oleh UPTD Liponsos Keputih Surabaya. Penelitian ini berfokus pada penggunaan tiga indikator yaitu Penyadaran, Pengkapasitasan, dan Pendayaan untuk mengetahui pemberdayaan individu di UPTD Liponsos Keputih yang memiliki masalah kesejahteraan sosial (PMKS). Lokasi ini dipilih berdasarkan kondisi yang ada bahwa UPTD Liponsos Keputih sebagai tempat pemulihan atau rehabilitasi sosial dan juga tempat tinggal sementara bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial. Teknik penentuan informan dalam penelitian ini menggunakan Teknik *purposive sampling* yakni teknik yang disesuaikan dengan pengambilan sampel berdasarkan kriteria relevan dengan topik penelitian. Selanjutnya, informan dalam penelitian ini meliputi Kepala UPTD sebagai *key informan*, Pendamping Barak (klien) dan pembimbing keterampilan. Sumber data yang digunakan ada 2 jenis yakni data primer dan sekunder yang diperoleh dari hasil pengambilan data dengan cara observasi lapangan, wawancara serta dokumentasi. Teknik analisis Miles & Huberman digunakan dalam penelitian dengan meliputi tahapan seperti: pengumpulan data, reduksi, penyajian, hingga penarikan kesimpulan. Langkah awal penelitian yang dilakukan yaitu dengan mengumpulkan data, yaitu pengumpulan informasi melalui observasi, wawancara, dan pencatatan. Dalam penelitian ini, reduksi data mengacu pada metode pemilihan data dengan mempersempit atau memusatkan hasil pengumpulan data lapangan. Penyajian data melibatkan pemberian narasi atau presentasi terorganisir yang informatif atau mudah dipahami dari sekumpulan data. Selanjutnya, tahapan terakhir yaitu penarikan kesimpulan penelitian ini dipaparkan dengan narasi yang mendukung gagasan dan bukti-bukti yang relevan.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Menurut perwali No 118 Tahun 2021 terkait dengan Pembentukan dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas Lingkungan Pondok Sosial Keputih, yaitu sebagai lembaga yang menangani pelayanan kesejahteraan

sosial. UPTD Liponsos Keputih yakni beroperasi di bawah naungan dan koordinasi Dinas Sosial Kota Surabaya yang bertugas khusus dalam menangani permasalahan kesejahteraan sosial. Dalam pelaksanaannya UPTD Liponsos Keputih juga bekerja sama dengan Satpol PP Kota Surabaya dalam hal penjangkauan dan penertiban individu yang terlantar di wilayah Kota Surabaya.

Sebagai lembaga yang berfungsi dalam pemberdayaan dan rehabilitasi sosial, UPTD Liponsos Keputih tidak hanya berperan dalam menyediakan tempat penampungan sementara, namun juga menjadi pusat pemulihan sosial dan pengembangan potensi individu bagi para PMKS, termasuk gelandangan psikotik. Pemberdayaan ini menjadi aspek krusial yang tidak hanya bersifat kuratif tetapi juga preventif, untuk mencegah kembalinya individu ke kondisi sosial yang rentan dan termarginalkan. Oleh karena itu, penting untuk menilai proses pemberdayaan yang dilakukan secara komprehensif, guna melihat sejauh mana efektivitasnya dalam meningkatkan kualitas hidup dan kemandirian sosial.

Guna mengukur berhasil atau tidaknya proses pemberdayaan, digunakan pendekatan dari Wrihatnolo dan Dwidjowijoto (2007) yang membagi pemberdayaan ke dalam tiga tahapan utama, yaitu: tahap penyadaran, pengkapasitasan, dan pendayaan. Ketiga tahap ini menjadi kerangka kerja yang sangat relevan dalam menilai sejauh mana intervensi sosial yang dilakukan oleh lembaga seperti UPTD Liponsos Keputih mampu menyentuh aspek mendasar dari transformasi sosial individu.

Tahap Penyadaran

Tahap penyadaran adalah langkah awal yang sangat penting dari sebuah pemberdayaan, dimana pada fase ini, individu yang menjadi sasaran program pemberdayaan dalam hal ini Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) diberikan pemahaman mengenai hak-hak dasar yang mereka miliki, potensi yang ada dalam diri, serta kesempatan untuk mengakses berbagai sumber daya yang tersedia. Pada tahap ini, masyarakat akan diberikan berbagai bentuk pencerahan seperti edukasi maupun sosialisasi dan komunikasi yang intensif dengan tujuan membangun kesadaran diri, meningkatkan kepercayaan diri, serta mengubah pola pikir dari pasif menjadi aktif dalam memanfaatkan peluang yang ada untuk perbaikan hidup. Proses penyadaran ini menjadi landasan penting dalam sebuah pemberdayaan, karena tanpa adanya pemahaman yang baik, masyarakat cenderung pasif dan kurang menyadari akan peluang sumber daya yang dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan diri.[15]

Di UPTD Liponsos Keputih Surabaya, tahapan ini dimulai dengan pemberian pelayanan kesehatan yang menjadi pintu masuk bagi seluruh klien PMKS. Pelayanan kesehatan tersebut tidak hanya bertujuan untuk mengobati, tetapi juga menjadi bentuk tindakan awal untuk menstabilkan kondisi fisik dan mental mereka. Hal ini sangat penting, mengingat sebagian besar gelandangan psikotik yang ada di UPTD dalam kondisi tidak stabil secara medis maupun psikologis.

Sebagaimana digambarkan dalam Alur Pelayanan Klien UPTD Liponsos Keputih Surabaya, dimana klien diterima oleh UPTD yang selanjutnya akan dilakukan asesmen awal untuk menilai kondisi kesehatan dan kebutuhan spesifik mereka. Klien yang membutuhkan penanganan medis lebih lanjut akan dirujuk ke rumah sakit mitra dengan didampingi oleh pendamping klien.

Gambar 1. Alur Pelayanan Klien UPTD Liponsos Keputih Surabaya.



Sumber: UPTD Liponsos Keputih Surabaya

Pada alur layanan klien benar adanya bahwa pelayanan kesehatan atau perawatan klien (PMKS) menjadi langkah awal dalam pemberdayaan. UPTD Liponsos Keputih memastikan bahwa mereka mendapatkan layanan kesehatan yang sesuai dengan kondisi masing-masing. Oleh karena itu, pelayanan kesehatan ini bertujuan untuk rehabilitasi, sehingga dapat menstabilkan kondisi kesehatan mental serta meningkatkan kualitas hidup bagi pmks.

Monitoring juga dilakukan guna memantau perkembangan kondisi pmks dengan memastikan efektifitas perawatan yang diberikan serta membantu proses pemulihan secara berkelanjutan, seperti yang disampaikan oleh informan Bapak Imam Muhaji selaku Kepala UPTD:

“Jadi setelah rujukan atau pengobatan selesai, mereka kembali kesini tentunya mendapatkan pelayanan sesuai dengan yang dibutuhkan dan itu sudah menjadi tugas dari pendamping klien. Kalaupun memang masih membutuhkan perawatan juga menjadi tugas pendamping untuk melakukan kontrol ke rumah sakit”. (Hasil wawancara 19 Februari 2025)

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa, *monitoring* terhadap kondisi klien merupakan bagian penting dari tahapan penyadaran. *Monitoring* secara berkelanjutan dilakukan guna memastikan seberapa efektifitas perawatan dari layanan kesehatan yang diberikan, serta mengidentifikasi adanya kebutuhan tambahan yang mungkin muncul selama perawatan. Selain itu, adanya pendamping klien menjadi peran penting penting, dimana klien mendapatkan perhatian khusus terkait kondisi kesehatannya, serta dapat mendukung dalam hal pemulihan.

Oleh karena itu, tahap penyadaran menjadi fase yang paling panjang dalam proses pemberdayaan, karena pada dasarnya pemberian layanan kesehatan tidak bisa memberikan hasil yang instan. Karena masih adanya perubahan kondisi kesehatan klien yang tidak bisa diprediksi sehingga memerlukan waktu, dan perawatan yang berkelanjutan masih dibutuhkan hingga klien mencapai kondisi yang optimal dan siap untuk diberdayakan. Selain itu, tahap penyadaran, dalam konteks ini tidak hanya berkaitan dengan pengetahuan rasional yang bersifat kognitif, tetapi juga menyentuh sisi emosional dan psikologis individu. Hal ini penting karena bagi gelandangan psikotik yang telah lama hidup dalam kondisi terlantar dan terabaikan, butuh waktu dan pendekatan empatik untuk membangun kembali rasa percaya diri dan keinginan untuk berubah. Keberhasilan tahap penyadaran menjadi fondasi penting bagi tahapan selanjutnya, karena tanpa pemulihan kesadaran diri dan kondisi mental yang stabil, upaya pemberdayaan lainnya berpotensi tidak optimal dan tidak berkelanjutan.

Tahap Pengkapasitasan

Tahap pengkapasitasan merupakan langkah lanjutan dalam proses pemberdayaan yang berfokus pada peningkatan kapasitas individu maupun kelompok agar mereka memiliki keterampilan, kepercayaan diri, dan sumber daya yang cukup untuk mencapai kemandirian hidup secara sosial maupun ekonomi.[15] Menurut Wrihatnolo dan Dwidjowijoto (2007) melalui pendekatan sistematis dan berbasis kebutuhan, tahap pengkapasitasan diharapkan dapat menjadi bekal individu maupun kelompok individu guna mampu mengenali serta mengembangkan potensi diri yang dimiliki, sehingga mereka mampu mengambil peran dalam proses pembangunan secara lebih efektif dan berkelanjutan.

Setelah PMKS khususnya gelandangan psikotik melewati tahapan penyadaran dan menerima perawatan medis yang memadai, mereka kemudian diarahkan untuk mengikuti berbagai program pengembangan diri. Program ini dirancang secara sistematis dan berbasis pada kondisi serta kapasitas masing-masing individu. Hal ini penting, karena setiap klien memiliki latar belakang, kondisi psikologis, serta tingkat penerimaan yang berbeda dalam menghadapi proses pemulihan dan pemberdayaan

Program pelatihan yang diberikan pada tahap ini dimulai dari pelatihan keterampilan hidup dasar (*life skill*), seperti menjaga kebersihan diri, merapikan tempat tidur, membersihkan lingkungan sekitar, hingga pengenalan terhadap rutinitas sederhana. Langkah-langkah ini dilakukan secara perlahan namun konsisten untuk membentuk kebiasaan positif yang dapat menjadi dasar bagi perkembangan kemampuan lainnya. Sebagaimana yang telah disampaikan oleh informan Ibu Iin selaku pendamping klien (PMKS):

“Awalnya diajarkan pelan-pelan mulai dari bersih diri seperti mandi, membersihkan lingkungannya, lama-lama mereka paham dan mandiri apa yang sudah diajarkan. Meskipun tidak semua dan masih ada juga yang perlu dibantu, tapi mereka bisa menyesuaikan diri di lingkungannya dan biasanya mereka yang dinilai aktif juga dirasa mampu diarahkan ke ruang keterampilan untuk kegiatan-kegiatan keterampilan”. (Hasil wawancara 18 Februari 2025).

Seperti yang di sampaikan informan, menunjukkan bahwa sebagian klien sudah mulai menunjukkan kemampuan untuk hidup lebih mandiri, setidaknya dalam menjalankan rutinitas harian secara konsisten. Proses ini merupakan pencapaian penting, terutama bagi mereka yang sebelumnya tidak mampu mengelola dirinya sendiri. Dengan adanya pembinaan berkelanjutan dari pendamping sosial, klien didorong untuk tidak hanya sekadar menyesuaikan diri, tetapi juga memiliki keterlibatan aktif dalam kegiatan pembinaan yang bersifat produktif.

Sebagai bagian dari pengembangan kapasitas, UPTD Liponsos Keputih juga menyediakan program-program kegiatan keterampilan yang disesuaikan dengan kondisi dan potensi masing-masing klien. Program ini menjadi salah satu instrumen pemberdayaan yang bertujuan agar klien memiliki bekal keterampilan yang berguna, baik untuk menunjang kehidupan di dalam lembaga maupun sebagai persiapan saat mereka kembali ke masyarakat. Hal ini ini dipertegas oleh pernyataan Bapak Imam Muhaji selaku Kepala UPTD Liponsos Keputih:

“Iya kami berikan kegiatan-kegiatan keterampilan yang juga menjadi salah satu pemberdayaan seperti kegiatan membatik, handicraft, ada juga budidaya tanaman serta usaha cuci motor”. (Hasil wawancara 19 Februari 2025)

Tabel 3. Jenis Kegiatan Pemberdayaan di UPTD Liponsos Keputih Tahun 2024

Jenis Kegiatan	Peminat
Menjahit	2 Orang
Membatik	10 Orang
Handicraft	12 Orang
Budidaya Tanaman	6 Orang
Cuci Mobil/Motor	10 Orang
Jumlah Peminat	40 Orang

Sumber: UPTD Liponsos Keputih Surabaya

Berdasarkan Tabel 3 dari berbagai kegiatan yang dijalankan, bahwa kegiatan handicraft menjadi salah satu kegiatan pemberdayaan yang paling diminati oleh klien. Handicraft merupakan kerajinan tangan yang dibuat dengan mengolah bahan baku dari lingkungan sekitar sehingga menghasilkan produk bernilai jual. Ragam produk kerajinan tangan yang diajarkan juga berganti di setiap minggu atau bulan yang akhirnya membuat mereka tetap antusias untuk mengikutinya. Sebagaimana yang disampaikan oleh informan Ibu Wiwit selaku pembimbing keterampilan:

“Kalau hasil produksinya sudah banyak ya kita ganti kerajinan lain mbak, yang lebih menarik dan punya daya nilai jual. Seperti dulu merajut alas kaki atau keset, ini sekarang pembuatan kotak tisu dari pelepah pisang juga strap HP”. (Hasil wawancara 20 Februari 2025)

Gambar 2. Hasil Produk Handicraft UPTD Liponsos Keputih



Sumber: UPTD Liponsos Keputih Surabaya

Namun, dalam pelaksanaannya, program pelatihan keterampilan ini masih menghadapi sejumlah tantangan yang membuat efektivitasnya belum maksimal. Salah satu kendala utama adalah ketergantungan terhadap kehadiran pembimbing keterampilan. Ketika pembimbing tidak hadir, kegiatan pelatihan praktis terhenti karena sebagian besar klien belum memiliki kemampuan atau inisiatif untuk melanjutkan kegiatan tanpa arahan langsung. Hal ini menunjukkan bahwa kemandirian klien dalam tahap ini masih relatif rendah dan sangat memerlukan bimbingan intensif serta keberlanjutan program. Sebagaimana yang di sampaikan oleh informan Ibu Iin selaku pendamping klien:

“Tidak pasti mbak untuk handycraft sendiri, karena pembimbingnya juga melatih di lain tempat. Jadi kalau tidak hadir, mereka tidak ada kegiatan untuk handycraft, karena mereka masih belum bisa jika tidak ada arahan. Jadi fokusnya ke pelatihan lain” (Hasil wawancara 19 Februari 2025)

Dengan demikian, meskipun tahap pengkapasitasan telah dirancang dengan baik melalui pelatihan keterampilan, pelaksanaannya masih menemui hambatan struktural yang perlu segera ditangani. Kurangnya kesinambungan bimbingan dapat berpengaruh terhadap keberhasilan pemberdayaan, terutama bagi klien yang masih berada dalam proses pemulihan psikis dan belum memiliki daya inisiatif tinggi. Oleh karena itu, dibutuhkan upaya penguatan kapasitas pendamping dan pembimbing, serta perencanaan program yang lebih fleksibel dan adaptif terhadap dinamika lapangan. Penguatan ini juga harus disertai dengan monitoring yang terstruktur dan evaluasi berkala, agar pelatihan yang diberikan benar-benar mampu meningkatkan kemandirian klien secara nyata.

Di sisi lain, digitalisasi program pelatihan juga dapat menjadi alternatif strategis untuk menjangkau keberlanjutan pelatihan di tengah keterbatasan sumber daya manusia, seperti ketersediaan pembimbing keterampilan. Misalnya, melalui pengembangan modul pelatihan berbasis video, klien tetap dapat melanjutkan aktivitas keterampilan meskipun pembimbing tidak hadir secara fisik. Langkah ini sejalan dengan upaya modernisasi sistem pelayanan sosial dan pemanfaatan teknologi sebagai alat bantu pembelajaran adaptif.

Selain penguatan kapasitas melalui pelatihan keterampilan teknis, aspek psikososial klien juga perlu mendapatkan perhatian yang memadai dalam tahap pengkapsitasan. Pendekatan yang bersifat humanistik dan empatik dinilai mampu membangun relasi positif antara klien dan pendamping, sehingga menciptakan lingkungan yang kondusif bagi proses pembelajaran. Peningkatan motivasi intrinsik klien dapat diupayakan melalui metode partisipatif, seperti pelibatan aktif dalam perencanaan kegiatan atau pemberian ruang untuk menyampaikan pendapat. Hal ini menjadi krusial mengingat keberhasilan program tidak semata ditentukan oleh penguasaan keterampilan, tetapi juga oleh tingkat keterlibatan dan rasa memiliki dari klien terhadap proses yang dijalani.

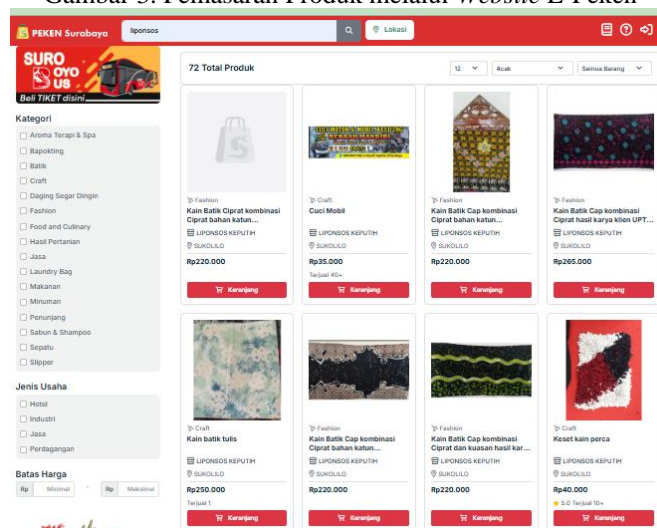
Tahap Pendayaan

Tahap pendayaan merupakan fase akhir dalam proses pemberdayaan yang berfokus pada implementasi keterampilan serta integrasi sosial-ekonomi klien secara mandiri. Pada tahap ini, klien yang telah melalui proses penyadaran dan pengkapsitasan diharapkan mampu menerapkan keterampilan yang telah mereka peroleh dalam kegiatan produktif yang berkelanjutan. Pendayaan bukan hanya soal kemandirian ekonomi, tetapi juga tentang bagaimana klien mampu memiliki peran di masyarakat, merasa dihargai, serta memiliki rasa percaya diri untuk menjalani kehidupan secara mandiri..[15]

Salah satu bentuk nyata dari tahap pendayaan adalah memberikan akses terhadap peluang kerja, usaha kecil, atau kegiatan ekonomi lainnya yang sesuai dengan kondisi dan kemampuan masing-masing individu. Di lingkungan UPTD Liponsos Keputih, hasil keterampilan seperti produk *handicraft* dari klien mulai dipasarkan ke publik sebagai bentuk konkret dari pendayaan tersebut. Hal ini bertujuan untuk tidak hanya memberikan penghargaan terhadap usaha mereka, tetapi juga membuka peluang ekonomi yang lebih luas bagi mereka.

Produk-produk hasil karya para klien, seperti kotak tisu dari pelepah pisang, tas rajut, strap HP, dan berbagai jenis kerajinan tangan lainnya, dipamerkan dan dipasarkan melalui beberapa kanal. Salah satu media pemasaran yang digunakan adalah platform digital milik Pemerintah Kota Surabaya, yakni **website E-Peken Surabaya**, yang berfungsi sebagai wadah pemasaran produk UMKM dan lembaga sosial binaan pemerintah.

Gambar 3. Pemasaran Produk melalui Website E-Peken



Sumber: Website E-Peken Surabaya

Selain melalui *website* E-Peken, pemasaran produk keterampilan juga dilakukan melalui partisipasi dalam event pameran, serta adanya kunjungan tamu yang sedang berkunjung di UPTD Liponsos Keputih. Strategi ini memberikan ruang bagi PMKS untuk menampilkan hasil karyanya secara langsung dan meningkatkan jangkauan pasar. Seperti yang disampaikan oleh Bapak Imam Muhaji selaku Kepala UPTD Liponsos Keputih:

“Kita pasarkan kalau misalnya ada tamu biasanya kita ajak ke ruang keterampilan, ada juga di website E-Peken yang dinaungi oleh pemerintah kota, dan terkadang juga mengikuti event pameran. Kalau untuk saat

ini kami juga sedang mempersiapkan marketplace seperti Shopee ataupun Tokopedia". (Hasil wawancara 19 Februari 2025).

Langkah ini tidak hanya memperluas akses pasar bagi produk klien, tetapi juga membuka peluang penguatan kemandirian ekonomi melalui integrasi dengan ekosistem digital dan e-commerce. Pemanfaatan teknologi dalam pendayaan juga selaras dengan perkembangan zaman serta mendorong lembaga sosial untuk beradaptasi dengan pola pemasaran modern.

Dari sisi lain, pemberian apresiasi terhadap hasil karya klien melalui pemasaran dan pameran juga memiliki dampak signifikan terhadap rasa percaya diri mereka. Klien merasa bahwa jerih payahnya dihargai dan bahwa mereka memiliki kemampuan yang diakui. Hal ini menjadi stimulus penting dalam proses pemulihan psikologis serta motivasi internal mereka untuk terus belajar dan berkembang.

Dengan diberikannya wadah yang mendukung dalam tahap pendayaan, PMKS tidak hanya memperoleh manfaat ekonomi tetapi juga mengalami peningkatan harga diri dan kepercayaan sosial. Mereka tidak lagi hanya dipandang sebagai "obyek bantuan", tetapi sebagai individu yang memiliki kontribusi nyata. Partisipasi aktif dalam pemasaran, pengemasan, hingga pelayanan terhadap pengunjung juga memperkaya pengalaman mereka dalam dunia usaha termasuk dalam hal komunikasi, pengambilan keputusan, dan negosiasi.

Oleh karena itu, meskipun dalam tahap pendayaan menunjukkan kemajuan yang signifikan, program ini tetap memerlukan dukungan berkelanjutan dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, lembaga sosial, dan masyarakat, agar keberlanjutan dan efektivitasnya tetap terjaga.

VI. SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan diatas dapat disimpulkan bahwa pemberdayaan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), khususnya gelandangan psikotik, di UPTD Liponsos Keputih Surabaya berlangsung melalui tiga tahapan utama yakni:

Pertama, Tahap Penyadaran: pada tahap awal ini, PMKS diberikan pemahaman tentang hak-hak dasar, potensi diri, dan akses terhadap sumber daya yang tersedia. Layanan kesehatan yang diberikan bertujuan untuk menstabilkan kondisi fisik dan mental mereka, sehingga mereka siap untuk melanjutkan proses pemberdayaan. Pendampingan berkelanjutan menjadi kunci penting dalam memastikan keberhasilan tahap ini, dengan fokus pada penyadaran kognitif dan emosional untuk membangun rasa percaya diri dan motivasi untuk berubah. Kedua, Tahap Pengkapasitasan: Setelah kondisi fisik dan mental klien stabil, mereka diarahkan untuk mengikuti program pengembangan diri yang berbasis pada pelatihan keterampilan hidup dasar dan keterampilan produktif, seperti handicraft, membuat, dan budidaya tanaman. Program ini bertujuan untuk membekali PMKS dengan keterampilan yang memungkinkan mereka untuk hidup lebih mandiri dan berperan aktif dalam masyarakat. Namun, tantangan utama dalam tahap ini adalah ketergantungan terhadap bimbingan yang intensif, yang menunjukkan perlunya penguatan kapasitas pendamping dan pembimbing, serta penerapan metode pelatihan yang lebih adaptif, seperti digitalisasi. Ketiga, Tahap Pendayaan: Tahap ini merupakan implementasi keterampilan yang telah diperoleh PMKS dalam kegiatan produktif yang berkelanjutan. Produk-produk hasil keterampilan, seperti kerajinan tangan, dipasarkan melalui berbagai saluran, termasuk platform digital seperti E-Peken Surabaya, serta partisipasi dalam pameran. Pemasaran ini tidak hanya memberikan peluang ekonomi, tetapi juga meningkatkan harga diri dan kepercayaan diri PMKS. Pendayaan ini mencerminkan keberhasilan pemberdayaan dalam meningkatkan kemandirian sosial dan ekonomi mereka, namun tetap memerlukan dukungan berkelanjutan agar efektivitasnya tetap terjaga.

Secara keseluruhan, pemberdayaan PMKS di UPTD Liponsos Keputih Surabaya menunjukkan hasil yang signifikan dalam meningkatkan kualitas hidup mereka, namun tantangan tetap ada dalam hal keberlanjutan dan penguatan kapasitas sumber daya manusia. Integrasi teknologi dan pendekatan yang lebih fleksibel dalam pelaksanaan program dapat menjadi solusi untuk meningkatkan efektivitas pemberdayaan ini.

UCAPAN TERIMA KASIH

Segala puji dan syukur bagi Allah SWT atas limpahan berkat dan rahmat-Nya, sehingga penulis mampu menyelesaikan artikel ilmiah ini yang berjudul "Pemberdayaan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Gelandangan Psikotik Di UPTD Liponsos Keputih" dengan baik dan lancar. Keberhasilan serta kesuksesan dalam penulisan artikel ini tentunya tidak terlepas dari kontribusi dan dukungan berbagai pihak. Oleh karena itu, sebagai ungkapan apresiasi penulis menyampaikan rasa terima kasih yang tulus kepada kedua orang tua tercinta yang senantiasa memberikan dukungan secara moral maupun materil, seluruh jajaran UPTD Liponsos Keputih yang telah membantu serta memberikan informasi yang diperlukan dalam proses penelitian di lapangan, dan tak lupa juga dosen pembimbing yang dengan penuh kesabaran telah memberikan bimbingan serta masukan yang berharga dalam

penyusunan karya ini. Penulis menyadari masih terdapat kekurangan maupun kesalahan terkait penulisan, sehingga bentuk kritik maupun saran yang membangun sangat diharapkan. Semoga tulisan ini dapat memberikan manfaat serta menjadi referensi yang berguna bagi pembaca. Terimakasih.

REFERENSI

- [1] Badan Pusat Statistik, “Kota Surabaya Dalam Angka Municipality In Figures 2024,” 2024.
- [2] P. Cahyaningrum, “Gambaran Dukungan Sosial terhadap Penderita Gangguan Jiwa Terlantar,” 2022.
- [3] Badan Pusat Statistik, “Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Menurut Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Timur.”
- [4] R. Nur Azizah, H. Soetarto, and Y. Nurwahyudi, “Penanggulangan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dalam Pemberdayaan Masyarakat di Kab.Sumenep (Studi Fakir Miskin di Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab.Sumenep),” vol. 1, 2024.
- [5] D. David Nagaring and S. Sambiran, “Peran Pemerintah Dalam Mengatasi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di Kota Manado (Studi Di Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado),” *Jurnal Governance*, vol. 1, no. 2, p. 2, 2021.
- [6] K. Sandhi Laksa, “Implementasi Kebijakan Pemerintah Kota Surabaya Dalam Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Oleh Unit Pelaksana Teknis (UPTD) Liponsos Keputih,” *Praja Observer: Jurnal Penelitian Administrasi Publik*, vol. 02, 2022.
- [7] N. Z. Puspitasari, R. Nawangsari, K. Kunci:, M. Strategi, G. Psikotik, and L. Keputih, “Strategi Dinas Sosial Dalam Penanganan Gelandangan Penderita Psikotik di Lingkungan Pondok Sosial (Liponsos) Keputih Surabaya Kata Kunci Abstrak,” *Jurnal Sosial Ekonomi dan Humaniora*, vol. 8, pp. 602–608, 2022.
- [8] Peraturan Walikota, “Peraturan Walikota Surabaya Nomor 118 Tahun 2021 Tentang Pembentukan Dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas Lingkungan Pondok Sosial Keputih Pada Dinas Sosial Kota Surabaya,” 2021.
- [9] R. Mulyawan, *Masyarakat, Wilayah dan Pembangunan*. UNPADPress, 2016.
- [10] N. Dinda Permatasari and R. Nawangsari, “Pemberdayaan Anak Jalanan Oleh Komunitas ‘Save Street Child’ di Kabupaten Sidoarjo,” *Jurnal Sosial Ekonomi dan Humaniora*, vol. 8, pp. 403–409, 2022.
- [11] A. Syifa’unnisa, “Pemberdayaan Anak Jalanan Melalui Program Pelatihan Keterampilan Daur Ulang Kayu dan Kertas Di Yayasan Kumala Tanjung Priok,” 2022.
- [12] L. Enjelita, D. Widodo, and A. Soesiantoro, “Pemberdayaan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Oleh Unit Pelaksana Teknis (UPTD) Liponsos Keputih Surabaya,” 2022.
- [13] S. Alrahman, “Pemberdayaan Fakir Miskin Melalui Program Masyarakat Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Pada Masa Covid-19 Di Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau,” 2022.
- [14] A. W. Wamnebo *et al.*, “Efektifitas Pemberdayaan Masyarakat Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Melalui Peningkatan Kinerja Aparatur Sipil Negara Di Suku Dinas Sosial Kota Administrasi Jakarta Timur Provinsi DKI Jakarta,” 2023.
- [15] A. Said, “Pemberdayaa Masyarakat Desa Berbasis Program Padat Karya Tunai Di Desa Tongkonan Basse Kecamatan Masalle Kabupaten Enrekang,” 2021. [Online]. Available: <https://journal.unismuh.ac.id/index.php/kimap/index>

